



Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG dalam Pengusulan Bantuan Sosial di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan

Maulidiva Arisia Putri¹⁾, Isnaini Rodiyah²⁾

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam proses pengelolaan dan pengusulan bantuan sosial di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai upaya meningkatkan akurasi data, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu Kepala Desa, operator SIKS-NG, dan penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SIKS-NG terlihat dari lima indikator utama, Pada aspek pemahaman program, operator dan perangkat desa memahami fungsi dasar aplikasi meskipun membutuhkan peningkatan kemampuan teknis. Pada indikator ketepatan sasaran, SIKS-NG membantu menghasilkan data keluarga miskin yang lebih akurat, meskipun pembaruan data yang terlambat masih menimbulkan ketidaksesuaian. Dari sisi ketepatan waktu, aplikasi mempercepat proses pengusulan bantuan, namun beberapa tahap masih terkendala jaringan dan perangkat. Indikator tercapai tujuan terlihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam proses verifikasi penerima bantuan. Selain itu, perubahan nyata ditandai dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya kecemburuan sosial, serta membaiknya kualitas pelayanan publik di desa. Secara keseluruhan, penerapan SIKS-NG cukup efektif dalam mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial, meskipun optimalisasi sarana dan peningkatan kompetensi operator tetap diperlukan agar aplikasi berfungsi maksimal.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Efektivitas, Kesejahteraan, Siks-Ng.

Abstract

This study aims to describe the effectiveness of the implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) application in the process of managing and proposing social assistance in Plintahan Village, Pandaan District, Pasuruan Regency, as an effort to improve data accuracy, targeting accuracy, and transparency in the distribution of social assistance. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation, and involved informants selected using purposive sampling, namely the Village Head, SIKS-NG operators, and beneficiaries. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. The results showed that the effectiveness of the SIKS-NG application was seen from five main indicators. In terms of program understanding, operators and village officials understood the basic functions of the application although it required improvement in technical skills. In the targeting accuracy indicator, SIKS-NG helped produce more accurate data on poor families, although late data updates still caused discrepancies. In terms of timeliness, the application accelerated the aid proposal process, but several stages were still hampered by network and device constraints. The indicator of goal achievement was seen from increased transparency, accountability, and information openness in the aid recipient verification process. Furthermore, tangible changes are marked by increased public trust, reduced social jealousy, and improved quality of public services in villages. Overall, the implementation of SIKS-NG has been quite effective in supporting social welfare data management,

although optimizing facilities and improving operator competency are still needed for the application to function optimally.

Key words: *Social Assistance, Effectiveness, Welfare, Siks-Ng*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan sebagai pondasi pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakat sesuai hak asal-usul dan adat istiadat. Ciri khas desa meliputi lingkungan sosial yang homogen, kepadatan penduduk rendah, serta ketergantungan pada sektor pertanian dan usaha kecil. Namun, desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan dibandingkan wilayah perkotaan.

Untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara desa dan kota, pemerintah memperkuat kebijakan pembangunan desa guna mendorong kemandirian dan menekan angka kemiskinan. Salah satu langkahnya adalah penerbitan Permendesa Nomor 4 Tahun 2024 yang merevisi Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman pendampingan masyarakat desa. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendampingan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan serta memperjelas peran pendamping, tenaga ahli, dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa. Program ini memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mendukung pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi keluarga miskin. Transformasi digital melalui kebijakan seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN[6], dan Kepmensos No. 73/HUK/2024 mendorong integrasi data kesejahteraan sosial lewat aplikasi SIKS-NG. Di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, penerapan SIKS-NG dilakukan melalui pendataan ulang dan musyawarah desa agar data penerima bantuan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 1. Rapat Musyawarah Desa Tentang Data Penerima Bantuan



Sumber: Pemerintah Desa Plintahan (2025)

Musyawarah Desa Plintahan merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi Data Penerima Bantuan Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, pendamping sosial, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga penerima bantuan. Dalam forum tersebut, peserta bersama-sama meninjau dan membahas keakuratan data warga miskin dalam DTKS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Proses musyawarah dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif sehingga setiap usulan atau koreksi data dapat disepakati bersama. Kegiatan ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial sekaligus mendukung kebijakan nasional tentang transformasi digital dan integrasi tata kelola data sosial. Berikut disajikan data jumlah penerima bantuan sosial di Desa Plintahan.

Tabel 1. Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial di Pemerintah Desa Plintahan

Jenis Bantuan	2023	2024
PBI (Penerima Bantuan Iuran)	425	409
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako)	116	107
PKH (Program Keluarga Harapan)	42	45

Sumber: Pemerintah Desa Plintahan (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penerima bantuan sosial di Pemerintah Desa Plintahan menunjukkan adanya dinamika perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Pada program PBI (Penerima Bantuan Iuran), jumlah penerima mengalami penurunan dari 425 KK pada tahun 2023 menjadi 409 KK pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya proses verifikasi dan validasi data sehingga beberapa penerima dinyatakan sudah mampu atau tidak lagi memenuhi kriteria. Hal serupa terjadi pada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako) yang menurun dari 116 KK menjadi 107 KK pada tahun 2024. Sementara itu, pada program PKH (Program Keluarga Harapan) justru terjadi peningkatan dari 42 KK pada tahun 2023 menjadi 45 KK pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya penambahan keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan bersyarat tersebut. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya pembaruan dan penyesuaian data penerima bantuan sosial sebagai bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran dan akurasi penyaluran bantuan di tingkat desa.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menjadi gap permasalahan dalam penelitian ini. Proses input data di lapangan sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi SIKS-NG secara optimal. Selain itu, perangkat komputer yang digunakan memiliki performa rendah sehingga memperlambat pembaruan data secara real time. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti duplikasi data penerima, adanya keluarga miskin yang belum terdaftar, serta ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan. Akibatnya, muncul potensi kecemburuan sosial antarwarga, keterlambatan distribusi bantuan, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Penelitian oleh Siti Nur Rezki Pratiwi (2024) di Kelurahan Jatibening menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi[8]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG mempermudah pengolahan data kemiskinan dan pengusulan bantuan sosial, namun pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan optimal sehingga masih diperlukan perbaikan.

Selanjutnya, penelitian oleh Lailul Mursyidah dan Fadila Putri Arydianti (2024) di Desa Keber, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo[9], menemukan berbagai kendala yang dihadapi operator desa seperti keterbatasan pelatihan, sinkronisasi data pusat-daerah, serta hambatan teknis dalam penginputan data. Walaupun aplikasi SIKS-NG membantu proses usulan bantuan sosial, efektivitasnya belum maksimal karena kendala tersebut.

Sementara itu, penelitian Verikah Dwi Windari dan Isnaini Rodiyah (2023) di Desa Permisian, Kecamatan Jabon, menunjukkan bahwa SIKS-NG efektif mendukung penyaluran bantuan sosial secara tertata dan transparan. Namun, kurangnya bimbingan teknis dari pengembang aplikasi menyebabkan operator desa belum mampu memanfaatkan seluruh fitur sistem secara optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan aplikasi SIKS-NG di beberapa daerah, namun belum ada yang meneliti efektivitasnya dari segi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta perubahan nyata dalam tata kelola bantuan sosial di tingkat desa. Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis pengoperasian dan belum meninjau pengaruh keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur digital desa terhadap hasil pendataan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menilai efektivitas penerapan SIKS-NG di Desa Plintahan menggunakan indikator efektivitas Sutrisno (2007).

Menurut Sutrisno (2007), efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui lima indikator, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan adanya perubahan nyata. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam menilai sejauh

mana SIKS-NG berperan dalam memperbaiki tata kelola data bantuan sosial di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Data penelitian bersumber dari laporan operator SIKS-NG, data Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, serta dokumentasi musyawarah desa terkait validasi penerima bantuan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menilai efektivitas penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pengelolaan data kemiskinan di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan sistem dari proses input data hingga penyaluran bantuan sosial berdasarkan lima indikator efektivitas Sutrisno (2007): pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, Informan penelitian berjumlah tiga orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator SIKS-NG, dan warga penerima bantuan sosial. Teknik analisis data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang meliputi empat tahap: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini sangat relevan dalam pendekatan kualitatif karena memudahkan peneliti dalam memahami dinamika yang terjadi di lapangan dan memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas pelaksanaan sistem SIKS-NG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG mencerminkan keberhasilan sistem dalam mengelola data kemiskinan secara akurat dan terintegrasi. Berdasarkan Sutrisno (2007), efektivitas diukur melalui lima indikator: Pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata di Pemerintah Desa Plintahan.

A. Pemahaman Program

Indikator Pemahaman program ialah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana pemahaman pelaksanaan program untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan dari adanya program yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Adapun yang menjadi poin utama dalam pemahaman program antara lain yang pertama, mengenai pemahaman tujuan adanya program. Menurut Sutrisno (2007) pemahaman program adalah suatu keberhasilan suatu program yang ditentukan dari intensnya sosialisasi yang dilakukan unit teknis. Karena adanya sosialisasi dapat menciptakan kesamaan pemahaman informasi yang disampaikan ke masyarakat. Berikut informasi hasil wawancara bersama Ibu Nia selaku Operator SIKS-NG Pemerintah Desa Plintahan sekaligus Kasi Kesejahteraan Sosial di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

"Sosialisasi program dari pemerintah selama ini kami terima dengan cukup baik dari tingkat kabupaten ke pihak desa secara langsung melalui petunjuk dan arahan resmi. Kami sudah menjalankan program tersebut di lapangan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, pelaksanaan program sudah sesuai dengan praktik yang diharapkan." (Wawancara tanggal 01 Oktober 2025).

Bapak Nur Kholis selaku sekretaris desa juga menyampaikan sebagai berikut.

"Sosialisasi dari pemerintah kabupaten itu sebenarnya sudah ada baik dari dinas sosial, pemerintah kabupaten. Akan tetapi sosialisasi ini masih hanya disampaikan oleh operator SIKS-NG saja yaitu ibu nia, untuk saya sendiri sebagai sekretaris desa ini masih belum ada sosialisasi tapi ya saya belajar juga dari operator" (Wawancara tanggal 01 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemahaman terhadap program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan sudah cukup baik di kalangan pelaksana kebijakan, yaitu aparat pemerintah desa. Sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada pihak desa berjalan dengan lancar, sehingga aparat memahami tujuan,

mekanisme, serta langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman program pada level pelaksana sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berikut merupakan foto saat sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial untuk operator SIKS-NG.

Gambar 3. Sosialisasi Aplikasi SIKS NG



Sumber: Pemerintah Desa Plintahan (2025)

Foto di atas memperlihatkan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan kepada aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pandaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pelaksana kebijakan di tingkat pemerintah desa mengenai tata cara pengelolaan data dan pelaksanaan program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Kehadiran para aparat pemerintah desa dalam forum ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk menjalankan program sesuai dengan petunjuk dan arahan resmi dari pemerintah daerah. Sosialisasi semacam ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa agar memahami secara menyeluruh mekanisme dan tujuan program yang dijalankan. Dengan demikian, foto ini memperkuat hasil temuan bahwa pemahaman terhadap program SIKS-NG difokuskan pada aparat pelaksana sebagai ujung tombak keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa sosialisasi program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan telah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai arahan pemerintah daerah. Aparat pemerintah desa menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan, mekanisme, serta prosedur teknis pelaksanaan program, berkat adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten dan pihak pemerintah desa. Pelaksanaan pelatihan serta pendampingan teknis yang dilakukan secara berkala turut memperkuat kapasitas aparat dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG dengan lebih optimal. Dari hasil temuan tersebut, penulis menilai bahwa keberadaan pelatihan dan pendampingan teknis memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas implementasi program di tingkat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa tidak hanya memahami fungsi aplikasi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan pembaruan sistem dan melakukan perbaikan data secara mandiri ketika ditemukan kesalahan input atau ketidaksesuaian data. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan, karena memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) mengenai pemahaman program menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan sudah sejalan dengan teori tersebut. Menurut Sutrisno, tingkat pemahaman terhadap suatu program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh unit teknis agar tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman di antara pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa pemerintah kabupaten secara rutin melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada aparat pemerintah desa, sehingga mereka memahami tujuan, mekanisme, serta langkah-langkah pelaksanaan program secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa

aparatus pemerintah desa telah mampu menjalankan program sesuai dengan arahan pemerintah serta menyesuaikan diri terhadap pembaruan sistem secara mandiri. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Verikah Dwi Windari dan Isnaini Rodiyah (2023) di Pemerintah Desa Permisan, Kecamatan Jabon, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan SIKS-NG sangat dipengaruhi oleh intensitas pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada operator. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem digital, tetapi juga pada keberlanjutan pelatihan dan pendampingan teknis yang mampu meningkatkan kapasitas aparatus pemerintah desa dalam memahami dan menjalankan program secara efektif dan tepat sasaran.

B. Ketepatan Sasaran

Dalam menentukan keberhasilan suatu program, kesesuaian antara sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dengan penerima manfaat program merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, tetapi juga dari ketepatan program dalam menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurut Sutrisno (2007:125-126), indikator ketepatan sasaran digunakan untuk menilai apakah target yang dituju telah sesuai dengan tujuan awal program yang dirancang. Dengan kata lain, apabila penerima manfaat adalah masyarakat yang secara nyata memenuhi kriteria sebagai kelompok miskin, maka program dapat dikatakan berjalan efektif dan tepat guna. Dalam konteks program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG, penerima manfaat ditentukan berdasarkan data desil yang tersedia di dalam sistem. Data tersebut menjadi acuan untuk mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga bantuan benar-benar diarahkan pada kelompok rumah tangga miskin dan rentan miskin yang paling membutuhkan. Hasil wawancara dan observasi peneliti mengungkapkan bahwa penerima program bantuan sosial di Pemerintah Desa Plintahan secara umum sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ibu Nia selaku operator SIKS-NG sekaligus Kasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Desa Plintahan. Beliau menjelaskan:

“Kalau untuk ketepatan sasaran, beberapa data masyarakat miskin memang sudah sesuai dengan kondisi orangnya karena menggunakan data sesuai desil di aplikasi yaitu di desil 1 hingga 5. Akan tetapi, untuk verifikasi data, petugas pemerintah desa tetap wajib menelaah apakah warga tersebut layak atau tidak layak dinyatakan miskin. Kami bisa turun ke lapangan langsung, minta keterangan atau penjelasan ke yang bersangkutan, tetangga, RT, RW, hingga kepala dusun mengenai status ekonomi warga yang akan didata. Lalu aplikasi masih sering terjadi kesalahan pendataan berupa exclusion error maupun inclusion error, karena data dari BPS itu masih berupa data mentah yang belum diolah, jadi masih perlu banyak perbaikan.” (Wawancara tanggal 01 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia memiliki pengaruh langsung terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Meskipun sistem SIKS-NG telah mampu menyalurkan bantuan berdasarkan data desil yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, proses input data yang terlambat menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil warga dengan data yang tercatat di sistem. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, baik dalam bentuk warga miskin yang belum terdaftar maupun penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak layak. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan operator dalam mengelola aplikasi serta pembaruan perangkat input data menjadi langkah penting agar proses verifikasi dan pembaruan data dapat berjalan secara real time dan akurat, sehingga ketepatan sasaran program bantuan sosial di Pemerintah Desa Plintahan dapat tercapai secara optimal. Hal ini tercermin dari penuturan Ibu Farida, salah seorang warga Pemerintah Desa Plintahan penerima bantuan sosial, yang menyatakan:

“Saya merasa bantuan yang diberikan dari pemerintah sudah cukup tepat karena memang diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Data penerima juga sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga, jadi yang tidak layak biasanya tidak dapat bantuan. Tapi memang kadang ada juga warga yang sebenarnya masih kesulitan tapi belum terdaftar karena datanya belum masuk ke aplikasi. Jika mendapatkan bantuan

petugas pemerintah desa biasanya datang ke rumah untuk menanyakan kondisi kami dan memastikan apakah masih layak menerima bantuan atau tidak. Jadi kalau ada kesalahan data, seperti orang yang tidak miskin tapi masih dapat bantuan, biasanya akan segera diperbaiki setelah dicek langsung oleh pihak pemerintah desa.”(Wawancara tanggal 01 Oktober 2025)

Keterangan tersebut memperkuat pernyataan dari pihak aparat pemerintah desa bahwa proses verifikasi lapangan menjadi langkah penting dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Meskipun data awal dalam aplikasi SIKS-NG masih memerlukan perbaikan akibat kesalahan pendataan dari sumber BPS, keterlibatan langsung petugas pemerintah desa dalam pengecekan kondisi warga membantu mengurangi kesalahan tersebut. Selain itu, pengakuan warga juga menunjukkan adanya transparansi dan upaya perbaikan berkelanjutan dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Keterangan ini diperjelas dengan data pada Tabel yang menunjukkan tingkat perubahan data penerima bantuan, sebagai berikut.

Tabel 2. Data Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial dan Realisasi Penerimaan

Jenis Bantuan	2023	2024	2025
PBI	425 (Individu)	409 (Individu)	312 (individu)
BPNT	116 (KK)	107 (KK)	117 (KK)
PKH	42 (KK)	45 (KK)	38 (KK)

Sumber: Pemerintah Desa Plintahan (2025)

Berdasarkan tabel tahun 2023–2025, jumlah penerima bantuan sosial menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap program. Bantuan PBI mengalami penurunan secara konsisten dari 425 individu pada tahun 2023 menjadi 409 individu pada tahun 2024 dan turun signifikan menjadi 312 individu pada tahun 2025, dinamika yang berbeda ini dikarenakan adanya pemutakhiran data, pengurangan kuota, dan peningkatan kesejahteraan sebagian masyarakat. Sementara itu, BPNT mengalami fluktuasi, dari 116 KK pada tahun 2023 turun menjadi 107 KK pada tahun 2024 hal ini terjadi adanya pengurangan data penerima bantuan yang sudah mampu dan pengurangan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, lalu meningkat kembali menjadi 117 KK pada tahun 2025, hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga serta proses verifikasi data yang berkelanjutan. Adapun PKH juga bersifat fluktuatif, meningkat dari 42 KK pada tahun 2023 menjadi 45 KK pada tahun 2024, namun menurun menjadi 38 KK pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh perubahan penerima bantuan yang telah meninggal dunia dan adanya keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria. Secara keseluruhan, perubahan tersebut mencerminkan adanya evaluasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan data pada tabel, terlihat bahwa terdapat perubahan status penerima bantuan sosial pada tahun 2023-2024, baik karena kondisi ekonomi yang telah membaik maupun karena meninggal dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa proses pembaruan dan pemutakhiran data berjalan secara aktif sebagai bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan. Meskipun demikian, perubahan data yang cukup besar, khususnya pada PBI, juga mengindikasikan bahwa proses validasi masih memerlukan ketelitian dan pembaruan berkala agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian sasaran.

Hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa memperjelas bahwa perubahan data tersebut umumnya disebabkan oleh proses verifikasi ulang terhadap kondisi ekonomi warga serta pembaruan data dari BPS yang sebelumnya masih bersifat mentah dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Dalam praktiknya, petugas pemerintah desa melakukan pengecekan langsung kepada warga, RT, dan kepala dusun untuk meminimalisir kesalahan, baik dalam bentuk exclusion error maupun inclusion error. Sementara itu, keterangan dari pihak penerima bantuan menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa program ini sudah membantu dan relatif tepat sasaran, meskipun masih terdapat beberapa kasus penyesuaian data akibat keterlambatan pembaruan sistem. Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat

bahwa penerapan SIKS-NG telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi data dan transparansi penyaluran bantuan, namun tetap memerlukan pembaruan data yang lebih rutin serta peningkatan kapasitas operator agar efektivitas program dapat tercapai secara menyeluruh.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program sangat bergantung pada ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana data penerima benar-benar diperbarui sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. Dalam konteks penerapan SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan, besarnya persentase perubahan data khususnya pada program PBI menunjukkan adanya upaya serius dalam melakukan penyesuaian dan pembersihan data penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan input dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pembaruan data secara real time. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data apabila tidak diimbangi dengan verifikasi lapangan yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Verikah Dwi Windari dan Isnaini Rodiyah (2023) di Pemerintah Desa Permisian, Kecamatan Jabon, yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan SIKS-NG sangat dipengaruhi oleh kemampuan operator serta dukungan sarana prasarana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan telah berjalan cukup efektif dalam memperbaiki akurasi dan dinamika pembaruan data, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi sistem agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

C. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas penerapan program, karena keterlambatan dalam proses pengolahan maupun distribusi bantuan dapat mengurangi manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat penerima. Ketepatan waktu dalam pengelolaan data aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan mengalami beberapa kendala teknis yang cukup serius. Komputer yang digunakan untuk melakukan input data memiliki performa yang sudah menurun sehingga memperlambat proses pembaruan data secara real time. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya sinkronisasi data, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan seperti duplikasi data penerima bantuan, keluarga miskin yang seharusnya berhak namun belum terdaftar dalam sistem, hingga potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Apabila kendala teknis ini tidak segera ditangani, efektivitas program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG dapat terganggu dan tujuan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi tidak tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Plintahan, beliau menyatakan:

"Permasalahan terbesar yang kami hadapi saat ini adalah komputer yang digunakan untuk input data sudah sangat lambat. Setiap kali melakukan pembaruan data ke aplikasi SIKS-NG, prosesnya sering terhambat sehingga data tidak bisa ter-update secara real time. Akibatnya, muncul duplikasi data penerima bantuan dan bahkan ada warga miskin yang seharusnya berhak tetapi belum terdaftar dalam sistem. Kondisi ini cukup menghambat proses administrasi dan berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan kepada masyarakat." (Wawancara tanggal 01 Oktober 2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nia selaku Operator SIKS-NG sekaligus Kasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Desa Plintahan:

"Saya selama ini menangani proses input data sendiri, sementara komputer yang digunakan sudah sering bermasalah. Proses loading-nya lama, kadang aplikasi error saat sinkronisasi dengan server pusat, sehingga pembaruan data bisa tertunda hingga beberapa hari. Kondisi ini membuat data penerima tidak langsung masuk ke sistem pusat dan berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan secara administratif. Meski begitu, kami tetap berupaya agar masyarakat tetap menerima bantuan tepat waktu, biasanya dengan sistem rapel, yaitu bantuan diberikan sekaligus untuk dua bulan jika terjadi penundaan di bulan sebelumnya." (Wawancara tanggal 01 Oktober 2025).

Sementara itu, Ibu Farida, salah satu warga penerima bantuan, juga menyampaikan hal serupa:

"Selama ini bantuan sosial yang saya terima tetap sampai ke tangan kami, meskipun

kadang tidak setiap bulan. Biasanya bantuan diberikan sekaligus dua bulan, dan petugas pemerintah desa selalu menjelaskan alasannya karena proses datanya di sistem masih menunggu pembaruan. Bagi kami, hal itu tidak masalah selama bantuan tetap diterima dan sesuai dengan hak kami sebagai penerima.” (Wawancara tanggal 01 Oktober 2025).

Ketiga hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa indikator ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan belum sepenuhnya tercapai. Secara sistem, keterlambatan terjadi karena hambatan teknis seperti lambatnya kinerja komputer, gangguan sinkronisasi dengan server pusat, dan keterbatasan jumlah operator yang mengelola data. Kondisi ini menyebabkan proses pembaruan data tidak dapat dilakukan secara *real time* sehingga penyaluran bantuan administratif mengalami penundaan. Namun, dari sisi pelaksanaan di lapangan, aparat pemerintah desa tetap berupaya menjaga ketepatan waktu penyaluran dengan mekanisme *rapel*, sehingga masyarakat tetap menerima bantuan tanpa kehilangan haknya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara sistemik ketepatan waktu belum optimal, komitmen aparat pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan bantuan telah membantu menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Dengan demikian, peningkatan sarana teknologi dan penambahan tenaga operator menjadi langkah penting untuk memperbaiki aspek ketepatan waktu agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat diperkuat dari data tabel berikut.

Tabel 2. Jadwal dan Pola Penyaluran Bantuan Sosial

Jenis Bantuan	Jadwal Penyaluran Ideal	Praktik di Lapangan	Keterangan
PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Tidak ada jadwal penyaluran (langsung masuk ke kartu BPJS)	-	Bantuan berupa iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah.
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai / Kartu Sembako)	Setiap bulan	Dirapel, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali	Keluarga penerima manfaat terkadang menerima bantuan secara tidak rutin setiap bulan.
PKH (Program Keluarga Harapan)	Setiap 3 bulan sekali (antara tanggal 1–15)	Sesuai ketentuan	Bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Sumber: Wawancara Informan Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan data tabel yang disajikan, penulis menilai bahwa indikator ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan belum terlaksana secara optimal. Hambatan utama terletak pada kendala teknis, yaitu performa komputer yang menurun dan sering mengalami gangguan saat sinkronisasi dengan server pusat, sehingga proses pembaruan data tidak dapat dilakukan secara *real time*. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan administrasi dan distribusi bantuan, khususnya pada jenis bantuan BPNT yang dalam praktiknya sering disalurkan secara *rapel* dua hingga tiga bulan sekali. Meski demikian, pihak pemerintah desa tetap berkomitmen menjaga agar bantuan tetap tersalurkan dengan tepat kepada penerima yang berhak. Mekanisme *rapel* yang diterapkan menunjukkan adanya upaya adaptif dari aparat pemerintah desa untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan haknya, walaupun terdapat keterlambatan teknis dalam sistem. Sementara itu, dari sisi penerima bantuan, masyarakat masih merasa terbantu dan memahami kondisi tersebut karena komunikasi antara petugas pemerintah desa dan warga berjalan dengan baik. Dengan demikian, peningkatan kualitas sarana teknologi, penambahan tenaga operator, serta pelatihan teknis secara berkala menjadi faktor penting untuk memperbaiki aspek ketepatan waktu agar efektivitas program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG dapat tercapai secara maksimal.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007), fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga

oleh ketepatan waktu dalam proses implementasinya. Sutrisno menekankan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan, sehingga manfaat dapat segera dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam konteks Pemerintah Desa Plintahan, kendala komputer yang sudah tidak memadai jelas menghambat prinsip ketepatan waktu di sisi pengelolaan data, kelancaran distribusi bantuan ke masyarakat tidak rutin sesuai jadwal. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lailul Mursyidah dan Fadila Putri Arydianti (2024) mengenai penerapan SIKS-NG di Pemerintah Desa Keber, Kecamatan Krebung, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa kendala serupa juga terjadi. Penelitian kualitatif tersebut menyoroti permasalahan keterbatasan pelatihan bagi operator pemerintah desa, sinkronisasi data antara pusat dan daerah, serta kendala teknis yang sering menghambat kelancaran penginputan data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun aplikasi SIKS-NG telah membantu proses usulan bantuan sosial, efektivitasnya belum berjalan maksimal karena masih terbentur berbagai kendala teknis. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Pemerintah Desa Plintahan, dimana aplikasi memang membantu mempercepat proses pengusulan dan pengelolaan data, tetapi perangkat komputer yang tidak memadai dan distribusi bantuan tidak sesuai jadwal justru menjadi hambatan utama dalam pencapaian indikator ketepatan waktu.

D. Tercapainya Tujuan

Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan sejauh mana dampak pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutrisno (2007:125-126), indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah tujuan program yang telah ditentukan berhasil dicapai atau belum. Pencapaian tujuan program dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti jangka waktu pelaksanaan dan pencapaian target yang telah dirancang. Dengan kata lain, jika tujuan program terpenuhi dengan baik, maka program tersebut dianggap efektif; sebaliknya, jika tujuan belum tercapai, maka program dinilai belum efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kesesuaian antara tujuan program bantuan sosial dan hasil pelaksanaannya dapat dilihat melalui tabel yang menggambarkan tujuan serta capaian program bantuan sosial. Berdasarkan wawancara dengan

Ibu Nia selaku Operator SIKS-NG sekaligus Kasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Desa Plintahan menyampaikan:

“Kalau kita melihat dari sisi teknis, tujuan program sudah cukup tercapai. Data sudah mulai rapi karena diverifikasi melalui kunjungan langsung dan ada kendala teknis pada perangkat komputer, yang menyebabkan pembaruan data tidak dapat dilakukan secara real time lalu untuk distribusi bantuan memang tidak selalu sesuai jadwal. Jadi, menurut saya, tujuan utama program memang sudah terlihat hasilnya, tetapi masih ada ketidaksesuaian jadwal dengan yang ada di lapangan” (Wawancara, 01 Oktober 2025).

Sementara, menurut bapak Nur Kholis selaku Sekretaris Desa di Desa Plintahan menyampaikan sebagai berikut.

“Secara umum tujuan program bantuan sosial melalui SIKS-NG ini sudah mengarah pada perbaikan sistem pendataan dan penyaluran. Kami melihat data penerima sekarang lebih tertata dibanding sebelumnya karena sudah melalui proses verifikasi dari desa. Namun memang masih ada kendala, terutama pada fasilitas dan keterbatasan petugas yang menangani sistem. Jadi kalau ditanya apakah tujuan sudah tercapai, menurut saya sudah berjalan, tetapi belum bisa dikatakan maksimal karena masih perlu pembenahan dari sisi teknis dan ketepatan waktu penyaluran” (Wawancara, 01 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan sudah menunjukkan kemajuan dalam hal ketepatan penyaluran bantuan dan pengelolaan data penerima. Petugas pemerintah desa telah berupaya melakukan verifikasi langsung ke lapangan sehingga data penerima menjadi lebih akurat dan tertata. Namun, informan menyampaikan bahwa proses input data masih sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis pada perangkat komputer, yang menyebabkan pembaruan data tidak dapat dilakukan secara real time. Kondisi ini berdampak pada munculnya penerima bantuan yang belum sepenuhnya sesuai

kriteria serta warga miskin yang belum terdaftar dalam sistem. Selain itu, ketepatan waktu pada penyaluran bantuan belum sesuai jadwal. Oleh karena itu, meskipun tujuan program mulai tercapai secara teknis, efektivitasnya belum maksimal dan memerlukan peningkatan dalam ketepatan waktu agar dapat lebih optimal.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan pembaruan data akibat kendala teknis pada perangkat komputer dan terbatasnya sumber daya manusia yang menangani sistem. Kondisi ini berdampak pada ketidakseimbangan antara jumlah penerima yang sesuai dengan kriteria dan yang belum tepat sasaran. Di sisi lain, keterlibatan petugas pemerintah desa dalam melakukan verifikasi lapangan secara langsung menjadi langkah penting dalam memperbaiki akurasi data dan menjaga ketepatan penyaluran bantuan. Meskipun belum sepenuhnya efektif, penerapan SIKS-NG telah menunjukkan arah perbaikan menuju sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas operator serta pembaruan sarana pendukung secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data pada tabel, pencapaian tujuan program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan belum optimal meskipun telah menunjukkan adanya kemajuan. Peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sistem pendataan mulai berjalan lebih terarah, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi yang kurang memadai, seperti komputer yang lambat dan proses sinkronisasi data yang sering tertunda. Kondisi ini menyebabkan pembaruan data tidak dapat dilakukan secara real time, sehingga berdampak pada ketidaktepatan waktu penyaluran dan potensi ketidaksesuaian data penerima. Meskipun demikian, upaya aparat pemerintah desa dalam melakukan verifikasi langsung ke lapangan menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki kualitas pendataan dan memastikan bantuan tetap tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa meskipun tujuan program mulai tercapai, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan sarana pendukung dan pelatihan teknis bagi operator agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan program bantuan sosial di Pemerintah Desa Plintahan belum optimal. Sutrisno menjelaskan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata di lapangan. Meskipun data menunjukkan peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun 2023 ke 2024, kendala teknis seperti keterlambatan pembaruan data dan terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan efektivitas program belum optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lailul Mursyidah dan Fadila Putri Arydianti (2024) di Pemerintah Desa Keber, Kecamatan Krembung, yang juga menemukan bahwa keterbatasan teknis dan kurangnya pelatihan operator menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan program secara optimal.

E. Perubahan Nyata

Dalam indikator perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat sejauh mana target dari program merasakan adanya perubahan atau manfaat dari pelaksanaan program. Sesuai dengan teori Sutrisno (2007), perubahan nyata merupakan salah satu dari lima dimensi untuk mengukur efektivitas program yang mengacu pada sejauh mana program yang telah dilaksanakan dapat memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi target sasaran program. Perubahan nyata dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai harapan, yang dapat diukur dari perubahan pola pikir, kondisi fisik maupun perilaku. Berikut hasil wawancara bersama Ibu Farida sebagai berikut.

“Saya merasakan perubahan yang berbeda setelah menerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG ini karena sebelum adanya aplikasi tersebut saya tidak termasuk ke dalam masyarakat yang menerima bantuan padahal saya sangat

membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, beban kebutuhan sehari-hari dapat sedikit lebih ringan, terutama dalam hal membeli bahan pokok dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Bantuan tersebut bukan hanya membantu dalam mencukupi kebutuhan primer, tetapi juga memberikan rasa aman karena ada jaminan keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Lebih jauh, melalui bantuan ini saya juga mulai bisa mengelola usaha kecil-kecilan, misalnya berjualan makanan ringan, yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan modal. Kini dengan adanya tambahan penghasilan, saya bisa menabung sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Selain itu, suasana lingkungan sekitar juga terasa lebih guyub, karena warga saling membantu dalam proses distribusi bantuan, baik dalam hal informasi maupun tenaga, sehingga menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan antarwarga. Hal ini membuat hubungan sosial di masyarakat menjadi lebih harmonis, karena warga merasa diperlakukan adil dan tidak ada kecemburuan sosial antar penerima bantuan. Dengan demikian, manfaat bantuan sosial ini tidak hanya terasa secara ekonomi, tetapi juga dalam membangun iklim sosial yang lebih positif di desa kami.” (Wawancara tanggal 1 Oktober 2025)

Hasil wawancara dari pihak pemerintah desa yaitu bapak Nur Kholis selaku Sekretaris Desa sebagai berikut.

“Perubahan yang ada di masyarakat ini memang nyata ya, karena yang kami lihat masyarakat ini ekonominya berangsur-angsur membaik. Sebenarnya tidak hanya pada ekonominya saja tapi masyarakat yang menerima ini beberapa bisa mengelola usaha rumahan seperti toko sembako, jadi akses terhadap kebutuhan sehari-hari lebih mudah lah mereka daripada yang dulu-dulu.” (Wawancara tanggal 1 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa indikator perubahan nyata pada penerapan program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan terjadi pada berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Meskipun masih terdapat sebagian penerima yang belum merasakan perubahan secara maksimal, capaian tersebut mencerminkan bahwa tujuan program mulai terealisasi secara bertahap. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah desa dalam memastikan ketepatan data dan pendampingan terhadap penerima, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat Desa Plintahan.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007), pelaksanaan program bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan dapat dikatakan telah berjalan secara optimal pada indikator perubahan nyata. Sutrisno menjelaskan bahwa perubahan nyata dianggap tercapai secara optimal apabila program mampu memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi penerima manfaat, baik dari segi ekonomi, perilaku, maupun pola pikir. Berdasarkan hasil wawancara dan data pada tabel, terlihat bahwa penerima bantuan sosial telah merasakan peningkatan signifikan dalam kondisi ekonomi, kemampuan mengelola usaha rumah tangga, serta akses terhadap kebutuhan dasar. Penerima manfaat juga menunjukkan kemandirian ekonomi yang semakin kuat dan mulai memiliki orientasi jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga berhasil memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Verikah Dwi Windari dan Isnaini Rodiyah (2023) di Pemerintah Desa Permisan, Kecamatan Jabon, yang menyimpulkan bahwa penerapan SIKS-NG mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial serta memberikan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan program

SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan telah mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam menciptakan perubahan nyata, baik dari sisi ekonomi maupun pemberdayaan penerima manfaat secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi SIKS-NG di Pemerintah Desa Plintahan Kecamatan Pandaan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial, memperbaiki proses verifikasi dan validasi, serta mendorong transparansi dalam penyaluran bantuan. Pada hasil penelitian indikator pemahaman program, aparat pemerintah desa telah memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan dengan baik melalui sosialisasi dan pelatihan rutin. Ketepatan sasaran menunjukkan hasil cukup baik dengan 85% penerima sesuai kriteria, meskipun masih terdapat kesalahan data. Ketepatan waktu belum optimal akibat kendala teknis perangkat yang memperlambat pembaruan data, namun aparat tetap menyalurkan bantuan tepat sasaran melalui sistem rapel. Tercapainya tujuan menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan data dan distribusi bantuan, walau perlu peningkatan sarana dan SDM. Sementara itu, perubahan nyata terlihat dari meningkatnya kondisi ekonomi, kemampuan usaha, dan akses kebutuhan dasar masyarakat. Secara keseluruhan, Aplikasi SIKS-NG telah berjalan cukup efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga, meski masih perlu optimalisasi pada aspek teknis dan ketepatan waktu. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kapasitas operator, perbaikan sarana teknologi, dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan dukungan berkelanjutan dan optimalisasi sistem, penerapan Aplikasi SIKS-NG diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). *Efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*.
- Arlan, A. S. (2020). *Efektivitas program pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaipat Kabupaten Tapin*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, Juli 25). *Tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan*. Retrieved September 22, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>
- Baiq, D. K., Nur, F. E. A., Asrifia, R., & Abdul, C. R. (2024). Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205–219. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Dethan, M. A. (2019). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD): Suatu pendekatan teoritis*.
- Dinaningrum, & Fanida, E. H. (2024). *Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pengusulan dan verifikasi bantuan sosial di Desa Kledokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*.
- Halizatunnisa, S. S., et al. (2025). Efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 379–390. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15532789>
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 2024–2036.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods*



sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

- Mursyidah, L., & Arydianti, F. P. (2024). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) dalam pengusulan bantuan sosial. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 227–240. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i3.16182>
- Napitupulu, R., & Ritonga, F. U. (2023). Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial tunai (BST) periode Oktober–Desember 2020 bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 13, 548–560. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157398>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Pratiwi, S. N. R. (2024). *Analisis kualitas pelayanan aplikasi SIKS-NG pada Kelurahan Jatibening menggunakan WebQual 4.0*.
- Sutrisno. (2007). *Budaya organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan.
- Windari, V. D., & Rodiyah, I. (2023). *Mengubah sistem kesejahteraan sosial: Wawasan dari Sistem Informasi Generasi Selanjutnya (SIKS-NG)*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Transformasi Digital.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2024 tentang Petunjuk Teknis SIKS-NG.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., Priyanti, E., & Universitas Singaperbangsa Karawang. (2023). *Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purwakarta (studi kasus rumah tidak layak huni di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta)*.